

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, INVESTASI, DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2021

Fachri Hafidy Syahputra Sinik\* dan Mulyo Hendarto Robertus


Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Email: [fachrihafidy@students.undip.ac.id](mailto:fachrihafidy@students.undip.ac.id)

### ABSTRACT

*Regional inequality in Banten Province is the highest among all provinces located on Java Island. Since 2005-2021, it has experienced an increasing trend and is still classified as high. This study aims to analyze the effect of economic growth, unemployment, investment, and general allocation funds on regional inequality in Banten Province in 2005-2021. This research uses a quantitative approach with data sourced from the Badan Pusat Statistik of Banten Province. The method used is multiple linear regression with time series data. The research results show that economic growth has a negative effect on regional inequality. Unemployment has a positive effect on regional inequality. Investment has a negative effect on regional inequality. The general allocation fund has no effect on regional inequality. Suggestions that are expected to reduce regional inequality in Banten Province are creating sustainable economic growth, reducing the unemployment rate, and increasing investment.*

*Keywords: Regional Inequality, Economic Growth, Unemployment, Investment, and General Allocation Fund.*

 <https://doi.org/10.14710/djoe.41863>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

### PENDAHULUAN

Isu mengenai pembangunan ekonomi yang memiliki masalah multidimensi yang menjadi fokus dalam perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dan dilibatkan oleh perbaikan dari sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Mugihardjo (2007) memandang pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat pada tingkat regional maupun nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dianggap meningkat ketika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya juga meningkat tetapi dalam banyak kasus di negara berkembang, dalam prosesnya menciptakan ketimpangan pembangunan (Mopangga, 2011). Ketimpangan pembangunan secara teoritis dilatarbelakangi karena perbedaan (disparitas pembangunan) antar wilayah (Todaro dan Smith, 2012). Williamson (1965) menyatakan bahwa pada awalnya, pembangunan akan terkonsentrasi dan berpolarisasi

pada pusat pertumbuhan (*growth pole*) kemudian efek dari pembangunan pada pusat merambat ke daerah disekitarnya. Hipotesis Neo-Klasik berasumsi bahwa dalam proses pembangunan pada awalnya ketimpangan akan meningkat hingga pada suatu titik akan mengalami *trade-off* setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan yang terus berlanjut akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan wilayah (Syafrizal, 2008).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Proses pembangunan ekonomi pada seluruh wilayah di Indonesia tidaklah sama di mana beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga dalam konstelasi regional memicu ketimpangan wilayah (Yusica, 2018).

Indeks *Williamson* di Indonesia pada tahun 2011-2021 pada kategori tinggi karena diatas 0,5 di mana secara presisi pada tahun 2011-2015 mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2015-2021 terus mengalami peningkatan. Temuan tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di Indonesia tergolong tinggi sehingga pemerintah pusat terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah disisi lain mereduksi ketimpangan pembangunan salah satunya melalui otonomi daerah (Kementerian PPN Republik Indonesia, 2023).

Pulau Jawa merupakan wilayah di Indonesia yang pembangunan ekonominya dinilai sangat pesat karena berdekatan dengan ibukota Negara. Terdapat enam provinsi yang terletak di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Provinsi Banten berlokasi di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan wilayah ibukota DKI Jakarta serta Provinsi Jawa Barat. Letak tersebut menyebabkan Provinsi Banten menjadi daerah strategis karena berdekatan dengan *central business district* (Suhandi dan Hakin, 2021). Namun, provinsi Banten memiliki tingkat ketimpangan pembangunan yang paling tinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Pasca pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tampaknya mengalami peningkatan yang berkelanjutan, dan hal ini tetap tinggi selama periode tahun 2005 - 2021.

Pada nilai Indeks *Williamson* Provinsi Banten pada tahun 2005 – 2021 berada diangka 0,60 – 0,70 di mana menurut Sjafrizal (2008) nilai Indeks *Williamson* diatas 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah disuatu daerah tinggi. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2005-2009 terus mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2010-2021 cenderung stagnan. Ketimpangan pembangunan secara teoritis disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan baik karakteristik demografis, sumber daya, maupun akses modal (Arsyad, 2010).

Sjafrizal (2008) mengemukakan bahwa perbedaan demografis adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi demografis ini mencakup perbedaan antara tingkat pertumbuhan, struktur kependudukan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk pada tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik Indonesia (2022) mengidentifikasi pengangguran melalui perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan angkatan kerja. Daerah dengan kondisi demografis baik mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga mendorong pembangunan (Tarigan, 2010). Peningkatan pengeluaran pemerintah memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah bisa berperan sebagai stimulus ekonomi melalui program-program untuk mendorong produktivitas sumber daya, dengan hasil mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah (Edward, 2007). Fajri dkk. (2016) menyatakan hal serupa di mana peningkatan anggaran pemerintah berperan menurunkan ketimpangan wilayah secara signifikan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum terhadap ketimpangan pembangunan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan data *time series*. Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sedangkan uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan. Selanjutnya koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi variabel independen yang dipilih menjelaskan variabel dependen.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ketimpangan Wilayah

Teori ketimpangan wilayah dilatarbelakangi oleh teori ketidakseimbangan wilayah yang muncul sebagai reaksi terhadap konsep ketidakstabilan dan keseimbangan dari teori neo-klasik. Teori ketidakseimbangan wilayah mengasumsikan kekuatan pasar tidak mampu menghilangkan perbedaan antar wilayah bahkan sebaliknya yang justru cenderung memperburuk keadaan. Quraisyah (2020) mengasumsikan perubahan-perubahan dalam sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan. Quraisyah (2020) mengelaborasi teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan antar wilayah sehingga ditemukan fakta bahwa kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu efek balik negatif (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*).

Efek balik negatif dan penyebaran menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi, sedangkan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang. Quraisyah (2020) menyebutkan bahwa kondisi ini memberikan ruang terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang menimbulkan kesenjangan wilayah. Syafrizal (2008) menyatakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan diantaranya adalah:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan wilayah
5. Alokasi dana pembangunan wilayah

Perbedaan sumber daya menjadikan adanya wilayah maju (*develop region*) dan wilayah terbelakang. (*under developed region*). Ketimpangan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidup agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya (Faiz dan Nugroho, 2011).

### **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah**

Todaro dan Smith (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonom sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka panjang, dengan indikator kemajuan teknologi, institusional, dan faktor lainnya. Faktor - faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk sumber daya manusia, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan inovasi produk. Kuncoro (2010) mengemukakan enam karakteristik proses pertumbuhan ekonomi di negara maju, yaitu tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan produktivitas faktor total yang tinggi, transformasi struktural ekonomi, transformasi sosial dan ideologi, dan cenderung bagi negara maju untuk merambah wilayah lain sebagai pasar dan sumber bahan baku baru.

Hipotesis ini diperkuat oleh penelitian Herwin dan Mopangga (2011) yang menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Namun, penelitian lain oleh Islami dan Nugroho (2015), Yusica dkk (2018), dan Harahap dkk (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan signifikan dengan ketimpangan wilayah, artinya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan studi literatur, hipotesis penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah.

### **Hubungan Pengangguran dan Ketimpangan Wilayah**

BPS (2020) mendefinisikan pengangguran sebagai persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pendekatan angkatan kerja Sukirno (2010) mengkategorikan pengangguran menjadi tiga, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan konjungtur (musiman). Pengangguran dihitung sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. BPS (2020) mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan aktivitas mereka dalam mencari pekerjaan.

Pengangguran dapat memiliki dampak negatif, seperti mengurangi daya beli masyarakat dan penghasilan pajak pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Ibrahim. 2019). Penelitian Nuartha (2018), Yusica (2018), dan Andaresta (2023) mendukung gagasan bahwa pengangguran dapat berkontribusi pada ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan studi literatur, hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengangguran diduga memiliki pengaruh positif antara ketimpangan wilayah.

### **Hubungan Investasi dan Ketimpangan Wilayah**

Investasi dalam model perekonomian diperkenalkan sebagai bagian dari kapital untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2009). Alokasi investasi regional sangat penting apabila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Sjafrizal, 2008). Nurhuda dkk (2013) berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan dapat dipertimbangkan melalui pelaksanaan *switching policy*. Analisa alokasi anggaran menurut Didia (2016) perlu lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju agar unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara sekaligus.

Peningkatan investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa menyebabkan tenaga kerja dapat diserap lebih banyak sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2010). Islami dan Nugroho (2015); Handoko dkk (2018); Azim dkk (2022), dan Andaresta (2023) menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Berdasarkan studi literatur maka hipotesis penelitian ini adalah investasi diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah.

### **Hubungan Dana Alokasi Umum dan Ketimpangan Wilayah**

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan diidentifikasi melalui aliran keynesian yang menilai ketidakcukupan permintaan sebagai penyebab utama tidak tercapainya full employment dan hanya perubahan pengeluaran yang bersifat eksogen yang dapat mendorong perekonomian suatu wilayah menuju keseimbangan full employment (Edwards, 2007). Pembangunan ekonomi yang membutuhkan arus modal yang mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah (Andiaskiton, 2019).

Daerah yang mendapatkan alokasi dana pemerintah yang lebih besar akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Didia, 2019). Nuarta (2018); Handoko dkk (2018), serta Sidik dan Ridwansyah (2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan data *time series* untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten tahun 2005-2021. Analisis regresi pada dasarnya merupakan studi ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) yang tujuannya mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dan Porter, 2012). Model fungsi persamaan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (1)$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (2)$$

keterangan:

Y	: Ketimpangan wilayah
X1	: Pertumbuhan ekonomi
X2	: Pengangguran
X3	: Investasi
X4	: Dana alokasi umum
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$	: Koefisien regresi
$\varepsilon$	: error term

### Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Deteksi normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk sampel berukuran kecil (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan *Jarque Bera*.

b. Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah antara variabel bebas dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2005). Deteksi gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*):

1. Nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (baik)
2. Nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas (ada korelasi antar variabel bebas sehingga tidak baik untuk digunakan dalam model).

c. Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Konsekuensi heteroskedastisitas adalah biasanya varians sehingga uji signifikansi menjadi invalid. Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi heterokedastisitas digunakan Uji White. Uji White dilakukan dengan melihat nilai Obs\*R-squared. Data terkena heteroskedastisitas apabila semua variabel independen memiliki nilai Obs\*R-squared < alpha ( $\alpha = 0,05$ ).

d. Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan mendeteksi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2012). Pada penelitian ini, untuk mendeteksi autokorelasi di gunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan melihat Nilai probabilitas *Chi Square*. Asumsi dasar yang digunakan yaitu apabila nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* > 0,05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi serial begitu sebaliknya

### Uji Koefisien Regresi

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Hasil Uji t dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien dan nilai probabilitas variabel independen mempengaruhi variabel dependen jika nilai probabilitas variabel independen < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

b. Uji F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, dan dana alokasi umum secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan. Hasil uji F dapat diketahui dengan melihat hasil regresi Probabilitas (F-statistic). Variabel independen dapat dikatakan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika Probabilitas (F-statistic) kurang dari dari  $\alpha=0,05$ .

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai  $R^2$  adalah antara nol dan satu, di mana nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.133604	0.410529	0.325444	0.7504
Pertumbuhan Ekonomi	-0.000558	0.003543	-3.157451	0.0275
Pengangguran	0.008431	0.004323	2.950166	0.0479
Investasi	-0.001779	0.001309	-3.359340	0.0190
Dana Alokasi Umum	-0.032742	0.027951	-1.171441	0.2642
<i>R-squared</i>	0.653244			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.008552			

Berdasarkan hasil regresi tersebut maka didapatkan persamaan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \\
 Y &= 0.133604 - 0.00558 \cdot X_{1t} + 0.008431 \cdot X_{2t} - 0.001779 \cdot X_{3t} - \\
 &\quad 0.032742 \cdot X_{4t} + \varepsilon
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

#### Uji t (Uji Parsial)

Uji regresi secara parsial berfungsi untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi secara parsial diketahui

dengan melihat koefisien dan nilai signifikansi dari hasil estimasi dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a$  : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan Tabel 1, maka hasil dari uji parsial sebagai berikut:

- 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0.000558 dengan nilai signifikansi  $0.0275 < \alpha (0,05)$  artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.
- 2) Variabel Pengangguran (X2) memiliki nilai koefisien 0.008431 dengan nilai signifikansi  $0.0479 < \alpha (0,05)$  artinya variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima.
- 3) Variabel Investasi (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.001779 dengan nilai signifikansi  $0.0190 < \alpha (0,05)$ , sehingga variabel investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima.
- 4) Variabel Dana Alokasi Umum (X4) memiliki nilai koefisien sebesar -0.032742 dengan nilai signifikansi  $0.2642 > \alpha (0,05)$ , sehingga variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_4$ ) ditolak.

### Uji F (Uji Simultan)

Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Gujarati dan Porter, 2012). Uji simultan dilihat berdasarkan nilai probabilitas *F-statistic*. Variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika probabilitas *F-statistic* kurang dari  $\alpha = 0,05$ .

Berdasarkan Tabel 1 pada hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas *F-statistic* sebesar  $0.008552 < \alpha (0,05)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menandakan besaran persentase dari seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variasi variabel independen yang dihasilkan sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Gujarati dan Porter, 2012). Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0.653244 yang artinya 65,32 persen ketimpangan wilayah di Provinsi Banten dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum sedangkan 34,68 persen dipengaruhi variabel diluar model.



### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah artinya dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dapat meningkatkan pendapatan per kapita yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Islami dan Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat pasti diikuti dengan menurunnya ketimpangan wilayah. Yusica dkk (2018) dan Harahap dkk (2018) memiliki pandangan serupa bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah.

### **Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten**

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sejalan dengan hasil regresi. Pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Syafrizal (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah karena adanya perbedaan sumber daya.

Wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan industri manufaktur memiliki peluang lapangan kerja lebih banyak dari pada wilayah yang konsentrasi kegiatan ekonominya di bidang pertanian, perikanan atau peternakan, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah padat industri memiliki daya beli lebih tinggi dan daerah juga berkembang pesat karena uang pajak untuk Pembangunan yang disetorkan masyarakatnya lebih banyak daripada yang tinggal di wilayah dengan konsentrasi ekonomi nya non-industri manufaktur.

### **Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sejalan dengan hasil regresi. Investasi merupakan bagian dari kapital yang alokasi nya sangat penting untuk pembangunan wilayah guna menstimulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Sjafrizal, 2008).

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten**

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hipotesis penelitian yang dirumuskan tidak sejalan dengan hasil regresi. Dana alokasi umum merupakan *block grant* yang diberikan oleh pemerintah besumber dari APBN dan dialokasi kepada suatu daerah berdasarkan penghitungan celah fiskal dan alokasi dasar untuk pembiayaan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

Arus modal praktiknya lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap sehingga pemerintah mengalokasikan dana umum untuk menstimulasi pemerataan wilayah (Andiaskiton, 2019). Daerah yang memperoleh alokasi dana pemerintah mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat karena dorongan proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Didia, 2019).

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Investasi, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islami dan Nugroho (2015), Yusica dkk. (2018), Nuartha (2018), Handoko dkk (2018), Syarifah (2020), Sidik dan Ridwansyah (2020), Harahap dkk (2022), Azim dkk. (2022), Andaresta dkk (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan wilayah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun 2005-2021 sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan ketimpangan wilayah.
2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun 2005-2021 sehingga pengangguran yang meningkat akan meningkatkan ketimpangan wilayah.
3. Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun 2005-2021 sehingga investasi baik PMA dan PMDN yang meningkat akan menurunkan ketimpangan wilayah.
4. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun 2005-2021.
5. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun 2005-2021.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat berpengaruh pada penurunan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten sehingga pemerintah diharapkan untuk menciptakan program yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
2. Pengangguran yang meningkat berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten sehingga pemerintah harus mengupayakan penciptaan

lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi demografi masyarakat beserta sarana pendukungnya (fisik dan non fisik) agar pengangguran dapat terdistorsi.

- Investasi yang meningkat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten sehingga pemerintah harus mengupayakan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN yang tepat sasaran dan mendukung investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., & Sakata, M. (2005). Fiscal decentralization, commitment, and regional inequality: Evidence from state-level cross-sectional data for the United States. *IRJE*, 4.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210. Retrieved from <https://ejournalunsam.id/index.php/jensi/article/view/412>
- Andrias Kiton, M. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80. Retrieved from <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
- Aurelia Andaresta, R., & Riani, S. E., & M. Sy, W. (2023). Pendapatan asli daerah (PAD), penanaman modal asing (PMA), dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2012–2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1), 264–277. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.7159>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., Adi, R., Ginanjar, F., & Sultan. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. Retrieved from <http://jrie.feb.unpas.ac.id/index.php/jrie/article/view/23>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2005–2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Indonesia tahun 2021*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022c). *Realisasi investasi Provinsi Banten tahun 2005–2021*. Kota Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022d). *Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten tahun 2005–2021*. Kota Jakarta.
- Capello, R. (2015). *Regional economics* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Dewanto, P., Rujiman, & Suriadi, A. (2014). Analisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi*, 17.
- Didia, K. A. (2016). Analisis ketimpangan pembangunan di kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5(1), 101–108. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Edwards, M. E. (2007). *Regional and urban economics: Theory and methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315088969>
- Ezcurra, R., & Rapún, M. (2006). Regional disparities and national development revisited: The case of Western Europe. *European Urban and Regional Studies*, 13(4), 355–369. <https://doi.org/10.1177/0969776406068590>

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. H., Darwis, & Matondang, Z. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Profetik Ekonomi Syariah*, 1.
- Hartono, B. (2008). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal DJOE*, 1–78.
- Islami, F. S., & SBM, N. (2018). Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1), 29–39. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.564>
- Kaldor, N. (1970). The case for regional policies. *Scottish Journal of Political Economy*, 337–348. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1970.tb00712.x>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan teori pembangunan. In *Pembangunan masyarakat desa dan kota*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Dana alokasi umum Provinsi Banten tahun 2005–2021*. Kota Jakarta.
- Khan, R., Chaudhry, I. S., & Farooq, F. (2019). Impact of human capital on employment and economic growth in developing countries. *Review of Economics and Development Studies*, 5(3), 487–496. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i3.701>
- Kuznets, S. (1971). *Economic growth of nations*. Harvard University Press.
- Lincoln, A. (2016). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mopangga, H. (2010). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pembangunan IPB*, 4. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43543>
- Mugihardjo. (2007). *Ekonomi pembangunan teori dan kebijakan*. Semarang: Studi Nusa Semarang.
- Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan: Studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005–2011. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 110–119. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/74424-ID-analisis-ketimpangan-pembangunan-studi-d.pdf>
- Rahayu, T. I. (2010). Teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi sub teori Harrod-Domar. *Gema Eksos*, 6(1), 69–82. Retrieved from <https://e-jurnal.unisfat.ac.id/index.php/jg/article/view/193>
- Rostow, W. W. (1962). *Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi*. Surakarta: Bharatara.
- Suhandi, S., & Hakin, N. (2021). Analisis overlay sektor unggulan Provinsi Banten. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(2), 268–280. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i2.75>
- Syafrizal. (n.d.). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, R. (2010). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Revised ed.). Medan: Bumi Aksara.
- Todoaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan ekonomi negara dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the pattern. *Economic Development and Cultural Change*, 4. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1152097>

- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3854>
- Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 230–240.
- Zhang, Z., Zhang, W., & Duan, Y. (2019). Economic gains and environmental costs from China's exports: Regional inequality and trade heterogeneity. *Ecological Economics*, 164, 106340. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.020>